

ANALISIS KETIMPANGAN WILAYAH BERDASARKAN PDRB DAN PAD ANTARA RIAU DARATAN DENGAN RIAU PESISIR

Oleh :

Mairisa

Pembimbing : Yusbar Yusuf dan Hendro Ekwarso

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : risamai@yahoo.com

*Analysis Disparities Region Based On The PDRB and PAD Between
Riau Mainland with Riau Coastal*

ABSTRACT

This research was conducted in region Riau Mainland and Coastal Riau. The purpose of this study to determine the level of inequality region based on Gross Regional Domestic Product (GRDP) and the level of inequality region based Local Original Revenue (PAD) between region Riau Mainland and Coastal Riau of the year 2010-2015. This study uses secondary data, data that has been collected by the data collector agency and published to the user community of data. This data is sourced from the Central Statistics Agency of Riau Province, the data used in this study is data PDRB and data PAD 2010-2015. This research using quantitative descriptive method by describing and describing the data obtained as well as the calculation of the figures mathematically using analysis tool index entropy Theil. From the results of research based on entropy index Theil is known that, during a period of 6 years (2010-2015) inequality region Riau Mainland higher than the Coastal Riau based Gross Regional Domestic Product (GRDP). And during a period of 6 years (2010-2015) based on Local Original Revenue (PAD) inequality Riau Coastal region is higher than Riau Mainland.

Keywords : *Inequality Region, PDRB, PAD, Theil Entropy Index*

PENDAHULUAN

Ketimpangan wilayah merupakan suatu aspek yang umum terjadi di setiap negara baik negara miskin, negara berkembang, bahkan negara maju sekalipun memiliki masalah ketimpangan antar wilayah walaupun dengan ukuran yang berbeda-beda. Menurut Neo Klasik, ketimpangan wilayah ini terjadi karena setiap daerah memiliki

perbedaan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidak mengherankan apabila ada yang disebut daerah maju dan daerah yang terbelakang (Lukman dan Ghozali, 2013 : 2)

Kesenjangan antar wilayah seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat

mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah yang tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki ; adanya kecendrungan pemilik modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil. Disamping itu juga adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat atau provinsi kepada daerah seperti provinsi atau kecamatan (Barika, 2012 : 2)

Proses pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan suatu daerah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Setiap daerah atau wilayah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah tersebut terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi (Nurhuda dkk, 2013 : 110)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui

kondisi perekonomian disuatu wilayah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan salah satu ukuran makro rata-rata pendapatan bruto dari setiap penduduk disuatu daerah. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah dapat dikatakan daerah tersebut lebih kaya dibandingkan daerah yang lain, meskipun tidak semua penduduk dapat menikmati pendapatan tersebut.

Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten/Kota, 5 terdapat di daerah daratan yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, dan Pekanbaru dan 7 di daerah pesisir yaitu Rokan Hilir, Dumai, Siak, Pelalawan, Bengkalis, Kep. Meranti dan Indragiri Hilir.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi / Daerah yang cukup kaya baik dengan hasil bumi berupa migas dan hasil perkebunan berupa kelapa sawit, nenas, kelapa, karet dan lainnya. Akan tetapi masyarakat masih belum puas dengan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap masing-masing daerah.

Kekayaan yang dimiliki seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Ketertinggalan antara daerah satu dengan daerah lain dikarenakan tidak semua rencana pemerintah (alokasi investasi) dapat direalisasikan.

Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan keuangan sebagai sumber pembiayaan yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam alokasi.

Alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya lebih perlu diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Kuncoro, 2004 : 133)

Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif maka mereka harus mendapatkan dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Sesuai dengan tujuan dari pembangunan ekonomi daerah serta keterkaitannya ketimpangan wilayah, maka pemerintah daerah berkewajiban menyelesaikan ketimpangan wilayah tersebut.

Ketimpangan dapat terjadi apabila pendapatan dan pengeluaran daerah tidak seimbang, sedangkan faktor modal atau investasi mengalami kemerosotan.

Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tergantung kepada beberapa faktor salah satunya adalah kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Perbedaan kebijakan ekonomi masing-masing daerah akan berdampak pula kepada pertumbuhan ekonomi tiap-tiap daerah. Semenjak diberlakukannya UU No. 32 dan 33 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan peranan pemerintah daerah sangat dominan dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi di daerahnya masing-masing.

Adapun dipilihnya wilayah Riau Daratan dengan Riau Pesisir

sebagai tempat penelitian karena wilayah tersebut memiliki perbedaan sumber daya dan kemampuan dalam mendorong proses pembangunan.

Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana tingkat ketimpangan wilayah Riau Daratan dengan Riau Pesisir berdasarkan PDRB ? 2) Bagaimana tingkat ketimpangan wilayah Riau Daratan dengan Riau Pesisir berdasarkan PAD ?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui tingkat ketimpangan wilayah Riau Daratan dengan Riau Pesisir berdasarkan PDRB. 2) Untuk mengetahui tingkat ketimpangan wilayah Riau Daratan dengan Riau Pesisir berdasarkan PAD.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Kuncoro, 2004 : 9)

Menurut pandangan para Ekonom Klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill) maupun Ekonom Neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu 1) jumlah penduduk, 2) jumlah stok barang modal, 3) luas tanah dan kekayaan alam, 4) tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro, 2004 : 129).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui

kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu biasanya satu tahun. Perkembangan PDRB atas harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil pembangunan (Umiyati, 2013 : 45).

Teori/Model Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan bagian penting dalam analisis ekonomi wilayah dan perkotaan. Karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi wilayah dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Sasaran utama pertumbuhan ekonomi wilayah ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuh lambat. Pertumbuhan ekonomi wilayah ini juga dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah (Sjafrizal, 2014 : 88).

Model penyebab berkumulatif ini pertama dikemukakan oleh Nikolas Kaldor. Model penyebab berkumulatif tidak percaya pemerataan pembangunan antar daerah akan dapat dicapai dengan sendirinya berdasarkan mekanisme pasar. Menurut model ini, ketimpangan pembangunan regional hanya akan dapat dikurangi melalui program pemerintah (Sjafrizal, 2012 : 101).

Menurut hipotesis Neo-Klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar

wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesis ini bahwa pada negara-negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut menjadi lebih rendah. Kebenaran hipotesis Neo-Klasik diuji oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966 dan terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012 : 108-109).

Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan aspek umum yang terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah (Sjafrizal, 2008 : 104).

Ketimpangan antar wilayah melihat perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah yaitu antara daerah maju dan daerah berkembang (Sjafrizal, 2014 : 110).

Ketimpangan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna

untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2006 dalam Hesty, 2014 : 196).

Penyebab Ketimpangan Wilayah

1) Perbedaan kandungan sumber daya alam

Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih sedikit.

2) Perbedaan kondisi demografis

Kondisi yang meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.

3) Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi. Bila mobilitas kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula hanya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak akan dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan.

4) Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi wilayah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

5) Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Investasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena itu, daerah yang mendapatkan alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dapat menarik lebih banyak investasi swasta kedaerahnya akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kondisi ini tentunya akan dapat yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya terjadi bilamana investasi pemerintah dan swasta yang masuk ke suatu daerah tertentu ternyata lebih rendah, sehingga kegiatan ekonomi dan pembangunan daerahnya kurang berkembang baik (Sjafrizal, 2012 : 119-122).

Kebijakan Pembangunan Wilayah

Perubahan penerimaan dan belanja daerah akan langsung mempengaruhi kinerja pembangunan daerah bersangkutan. Penerimaan daerah dapat berbentuk pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak dan retribusi daerah berikut hasil bersih perusahaan

daerah, serta alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat (Sjafrizal, 2012 : 170-171).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah menurut Abdullah Syukriy dan Abdul Halim, 2003 merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain. Mamesah (1995), menyatakan besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Swandewi, 2014 : 361).

Menurut Neo Klasik, ketimpangan wilayah ini terjadi karena setiap daerah memiliki perbedaan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda (Lukman dan Ghozali, 2013 : 2).

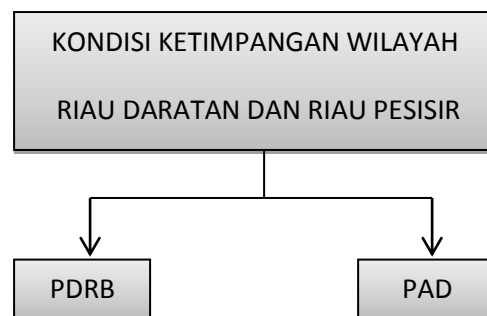
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

Perubahan penerimaan dan belanja daerah akan langsung

mempengaruhi kinerja pembangunan daerah bersangkutan. Penerimaan daerah dapat berbentuk pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Tingkat ketimpangan wilayah Riau Daratan lebih tinggi dari Riau Pesisir berdasarkan PDRB.
- 2) Tingkat ketimpangan wilayah Riau Pesisir lebih tinggi dari Riau Daratan berdasarkan PAD.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODOLOGI PENELITIAN

Daerah yang dijadikan objek penelitian adalah wilayah Riau Daratan (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, dan Pekanbaru) dan wilayah Riau Pesisir (Rokan Hilir, Dumai, Siak, Pelalawan, Bengkalis, Kep. Meranti dan Indragiri Hilir).

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder menurut Kuncoro (2004:145) adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Adapun data kajian yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain :

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2010-2015, PDRB tahun dasar 2010 dengan 17 sektor,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010-2015.

Teknik pengumpulan data yakni dengan cara mendatangi langsung instansi-instansi yang berkaitan sebagai objek penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian tersebut menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah diperoleh sebagaimana adanya dan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan perhitungan secara matematis karena data yang digunakan dalam penelitian berupa angka-angka. Metode analisis yang digunakan rumus dari indeks entropi Theil.

Rumus Indeks Entropi Theil : (Sjafrizal, 2014 : 111)

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{y_{ij}/Y\} \ln\{\{y_{ij}/Y\}/\{n_{ij}/N\}\}$$

Dimana :

T_d = Theil Index

y_{ij} = PDRB perkapita kabupaten i di wilayah j

Y = jumlah PDRB perkapita seluruh wilayah j

n_{ij} = jumlah penduduk kabupaten i di wilayah j

N = jumlah penduduk seluruh wilayah j

$$T_d = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \{y_{ij}/Y\} \ln\{\{y_{ij}/Y\}/\{n_{ij}/N\}\}$$

Dimana :

T_d = Indeks Entropi Theil

y_{ij} = PAD perkapita kabupaten i di wilayah j

Y = jumlah PAD perkapita seluruh wilayah j

n_{ij} = jumlah penduduk kabupaten i di wilayah j

N = jumlah penduduk seluruh wilayah j

Indeks entropi Theil yang semakin besar menunjukkan

ketimpangan yang semakin besar pula. Demikian pula sebaliknya, bila indeksinya semakin kecil, maka ketimpangan akan semakin rendah/kecil atau dengan kata lain akan semakin merata (Kuncoro, 2004 : 133-134).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perhitungan indeks ketimpangan wilayah Riau Daratan dengan Riau Pesisir menggunakan formula indeks entropi Theil. Indeks entropi Theil menunjukkan apabila indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya apabila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Indeks entropi Theil yang semakin besar maka ketimpangan semakin besar pula, demikian pula bila indeksinya semakin kecil akan semakin merata.

Tabel 1
Nilai Indeks Entropi Theil Riau Daratan dan Riau Pesisir berdasarkan PDRB Tahun 2010-2015

Tahun	Riau Daratan PDRB	Riau Pesisir PDRB
2010	0,14	0,13
2011	0,15	0,12
2012	0,15	0,11
2013	0,16	0,1
2014	0,14	0,12
2015	0,14	0,12

Sumber : Data Olahan, 2016

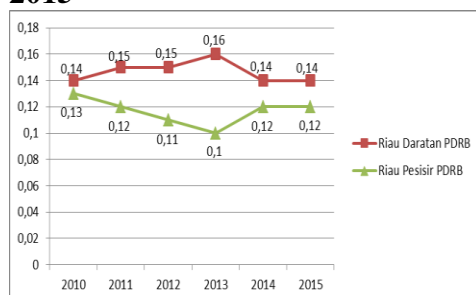
Berdasarkan Tabel 1, ketimpangan wilayah Riau Daratan

naik pada tahun 2011 dengan nilai indeks 0,15 dari tahun 2010 dengan nilai indeks 0,14. Kembali naik pada tahun 2013 dengan nilai indeks menjadi 0,16. Pada tahun 2014 nilai indeks menurun dari tahun 2013 menjadi 0,14 hingga tahun 2015. Sedangkan ketimpangan wilayah Riau Pesisir terjadi penurunan pada tahun 2011, 2012, 2013 dengan nilai indeks 0,12, 0,11, 0,1 dari nilai indeks 0,13 pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2014 nilai indeks kembali naik menjadi 0,12 hingga tahun 2015.

Dari hasil perhitungan indeks entropi Theil diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa masih terjadinya ketimpangan wilayah berdasarkan PDRB di Riau Daratan dan Riau Pesisir. Namun, ketimpangan wilayah Riau Daratan dan Riau Pesisir berdasarkan PDRB per kapita selama kurun waktu 6 tahun (2010-2015) masih tergolong dalam ketimpangan rendah atau kecil. Ketimpangan lebih tinggi terjadi di Riau Daratan dari pada Riau Pesisir.

Untuk mengetahui lebih jelas nilai indeks entropi Theil berdasarkan PDRB di Riau Daratan dan Riau Pesisir dapat kita lihat dengan grafik berikut ini :

Gambar 2
Grafik Indeks Entropi Theil Riau Daratan dan Riau Pesisir berdasarkan PDRB Tahun 2010-2015



Sumber : Data Olahan, 2016

Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perubahan penerimaan dan belanja daerah akan langsung mempengaruhi kinerja pembangunan daerah bersangkutan. Sumber penerimaan daerah dapat berbentuk pendapatan asli daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. PAD sekaligus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan regional.

Tabel 2
Nilai Indeks Entropi Theil Riau Daratan dan Riau Pesisir berdasarkan PAD Tahun 2010-2015

Tahun	Riau Daratan PAD	Riau Pesisir PAD
2010	0,01	0,41
2011	0,04	0,33
2012	0,05	0,4
2013	0,04	0,38
2014	0,11	0,25
2015	0,12	0,27

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan Tabel 2, Ketimpangan lebih tinggi terjadi di Riau Pesisir dari pada Riau Daratan.

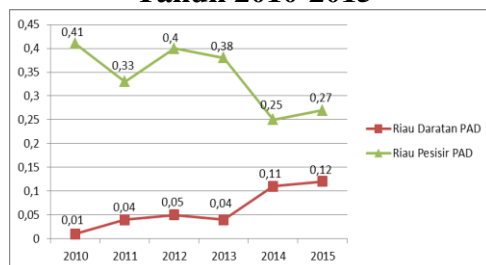
Pada tahun 2010 hingga 2013 terjadi pemerataan berdasarkan PAD di Riau Daratan dengan nilai indeks mendekati 0. Pada tahun 2010 sangat terjadi pemerataan dengan nilai indeks 0,01. Nilai indeks naik

menjadi 0,04 pada tahun 2011 dan kembali naik pada tahun 2012 dengan nilai indeks 0,05, kembali turun menjadi 0,04 pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 dan 2015 nilai indeks ketimpangan kembali naik hingga 0,11 dan 0,12.

Sedangkan ketimpangan wilayah Riau Pesisir berdasarkan PAD lebih tinggi dibandingkan dengan Riau Daratan. Ketimpangan PAD Riau Pesisir tertinggi selama kurun waktu 6 tahun (2010-2015) terjadi pada tahun 2010 dengan nilai indeks sebesar 0,41, mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 0,33 kembali naik dengan nilai indeks 0,4 pada tahun 2012, pada tahun 2013 hingga 2015 nilai indeks menurun menjadi 0,38 untuk tahun 2013, 0,25 untuk tahun 2014, 0,27 untuk tahun 2015.

Untuk mengetahui lebih jelas nilai indeks entropi Theil Riau Daratan dengan Riau Pesisir berdasarkan PAD dapat kita lihat dengan grafik berikut ini :

Gambar 3
Grafik Indeks Entropi Theil Riau Daratan dan Riau Pesisir berdasarkan PAD Tahun 2010-2015



Sumber : Data Olahan, 2016

Pembahasan

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB per kapita Riau Daratan dan Riau Pesisir yang

cenderung relatif meningkat terkecuali di tahun 2015 terjadi penurunan. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 PDRB per kapita Riau Daratan mengalami peningkatan dengan angka Rp 233.28 juta menjadi Rp 280,79 juta, namun menurun pada tahun 2015 menjadi Rp 275,26 juta. Sama halnya dengan PDRB per kapita Riau Daratan, PDRB per kapita Riau Pesisir juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan angka Rp 387,59 juta menjadi Rp 611,7 juta dan menurun di tahun 2015 menjadi Rp 599,23 juta.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi dapat diukur dari seberapa besar PDRB per kapita yang diterima. Namun demikian, tingginya PDRB per kapita yang diterima tersebut belum mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Terjadi nilai PDRB per kapita tinggi namun sebagian besar PDRB per kapita tersebut dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.

Dari hasil perhitungan indeks entropi Theil ketimpangan wilayah Riau Daratan naik pada tahun 2011 dengan nilai indeks 0,15 dari tahun 2010 dengan nilai indeks 0,14 yang disebabkan pada tahun 2011 turunnya PDRB per kapita dari tahun sebelumnya yang terjadi di kabupaten Rokan Hulu. Nilai indeks kembali naik pada tahun 2013 dengan nilai indeks menjadi 0,16, meski PDRB per kapita mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun nilai indeks meningkat pada tahun 2013 dikarenakan terjadi perbedaan kondisi demografis yang meliputi dalam hal jumlah penduduk yang cukup besar dengan nilai PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan

daerah lain yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru. Peningkatan PDRB per kapita akan mengurangi ketimpangan pembangunan, namun juga harus diikuti dengan mengurangi jumlah penduduk atau meningkatkan produktivitas setiap penduduk. Pada tahun 2014 nilai indeks Riau Daratan menurun dari tahun 2013 menjadi 0,14 hingga tahun 2015, dimana PDRB per kapita meningkat dari tahun 2014 namun menurun di tahun 2015 yang berarti meski menurunnya PDRB per kapita namun dapat mengatasi ketimpangan dengan meningkatkan produktivitas penduduk.

Sedangkan ketimpangan wilayah Riau Pesisir berdasarkan PDRB lebih kecil dibandingkan dengan Riau Daratan, walaupun dalam perbedaan yang relatif kecil. Ketimpangan wilayah Riau Pesisir terjadi penurunan pada tahun 2011, 2012, 2013 dengan nilai indeks 0,12, 0,11, 0,1 dari nilai indeks 0,13 pada tahun 2010 dengan perbedaan yang relatif kecil sebab PDRB per kapita masih terjadi penurunan pada tahun 2011 dan 2013 di kabupaten Siak dan Pelalawan. Kemudian pada tahun 2014 nilai indeks kembali naik menjadi 0,12 hingga tahun 2015. Menurunnya nilai indeks ketimpangan di Riau Pesisir pada tahun 2011 hingga 2013 akibat membaiknya kondisi demografis wilayah tersebut meliputi dalam hal jumlah penduduk yang lebih sedikit dengan PDRB per kapita yang lebih besar yang berarti kabupaten/kota mampu meningkatkan produktivitas penduduknya, dan mampu memanfaatkan sumber daya alamnya. Namun nilai indeks ketimpangan Riau Pesisir tahun 2014 hingga 2015 kembali naik menjadi

0,12 yang disebabkan juga terjadinya penurunan PDRB per kapita pada tahun 2015 di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai.

Dilihat dari sektor-sektor ekonominya yang lebih mendominasi di Riau Daratan adalah sektor sekunder yaitu industri pengolahan dan konstruksi, selanjutnya diikuti oleh sektor primer yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Sedangkan di Riau Pesisir sektor-sektor ekonomi yang lebih mendominasi adalah sektor primer dan sektor sekunder yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor. Ketimpangan wilayah Riau Daratan lebih tinggi dari Riau Pesisir disebabkan lebih besarnya PDRB per kapita yang dihasilkan Riau Pesisir dibandingkan Riau Daratan, yang berarti Riau Pesisir lebih mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada serta didukung hasil sektor ekonominya dengan diikuti peningkatan produktivitas penduduk.

Ketimpangan wilayah yang terjadi di Riau Daratan dan Riau Pesisir juga dampak dari krisis keuangan yang melanda negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang mengganggu kinerja ekonomi global saat memasuki tahun 2012, perekonomian wilayah Riau Daratan dan Riau Pesisir sangat dipengaruhi oleh perekonomian global dan diperparah dengan kondisi kabut asap yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kembali tertekan (PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha, 2015 : 53-54).

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber penerimaan bagi daerah dapat dipungut melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. PAD sebagai sumber penerimaan Riau Daratan dan Riau Pesisir terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 6 tahun (2010-2015). PAD yang terus mengalami peningkatan seharusnya mampu dialokasikan secara merata oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Ketimpangan wilayah Riau Daratan dan Riau Pesisir berdasarkan PAD lebih tinggi terjadi di Riau Pesisir dari pada Riau Daratan. Pada tahun 2010 hingga 2013 terjadi pemerataan penerimaan berdasarkan PAD di Riau Daratan dengan nilai indeks mendekati 0. Pada tahun 2010 sangat terjadi pemerataan dengan nilai indeks 0,01 yang didukung dengan meningkatnya PAD Kabupaten/Kota dari tahun sebelumnya, berarti dalam proses penghimpunan menggali sumber penerimaan sangat mendukung serta mencerminkan tingkat pendapatan yang semakin membaik sebagai akibat meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, yang dapat juga dilihat dari PDRB. Meningkatnya PDRB akan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan sendirinya pajak akan naik sehingga mengakibatkan PAD akan meningkat pula.

Nilai indeks naik menjadi 0,04 pada tahun 2011 turunnya total penerimaan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah di Riau Daratan, akibat dari turunnya hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada setiap kabupaten di Riau Daratan, dan turunnya retribusi daerah di kabupaten Kampar, Rokan Hulu serta kota Pekanbaru diikuti dengan turunnya penerimaan lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Kampar. Nilai indeks kembali naik pada tahun 2012 dengan nilai indeks 0,05, disebabkan kembali turunnya penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Kampar dari tahun sebelumnya dan juga turunnya retribusi daerah kota Pekanbaru serta turunnya pungutan dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di kabupaten Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu.

Nilai indeks kembali turun menjadi 0,04 pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 dan 2015 nilai indeks ketimpangan kembali naik hingga 0,11 dan 0,12. Menurunnya nilai indeks ketimpangan pada tahun 2013 karena membaiknya atau meningkatnya PAD kabupaten/kota di Riau Daratan dari tahun sebelumnya. Namun kembali naiknya nilai indeks ketimpangan pada tahun 2014 hingga 2015, pada total hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah di Riau Daratan pada tahun 2014 mengalami penurunan serta disebabkan menurunnya PAD di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar (adanya penurunan pungutan dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, hasil penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), menurunnya pungutan hasil retribusi daerah di Kabupaten Indragiri Hulu, serta menurunnya pungutan dari hasil penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru.

Sedangkan ketimpangan wilayah Riau Pesisir berdasarkan PAD lebih tinggi dibandingkan dengan Riau Daratan. Ketimpangan PAD Riau Pesisir pada tahun 2010 dengan nilai indeks sebesar 0,41, mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi 0,33 karena meningkatnya PAD Kabupaten/Kota tersebut pada tahun 2011 yang didukung oleh pungutan pajak daerah yang juga meningkat, namun masih tingginya nilai indeks ketimpangan karena tidak didukung dengan penerimaan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, pungutan retribusi daerah menurun dari sebelumnya 2010 di kabupaten Rokan Hilir, Siak dan Pelalawan, pungutan lain-lain PAD yang sah menurun di kabupaten Siak dan Indragiri Hilir. Kembali naik ketimpangan dengan nilai indeks 0,4 pada tahun 2012, Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir mengalami penurunan PAD, dari total pajak daerah di Riau Daratan menurun dari tahun sebelumnya tahun 2011 DAN dilihat dari penerimaan pajak daerah terjadi penurunan pada tahun 2012 di kabupaten kota Dumai, Kabupaten Siak, Bengkalis, Kep. Meranti dan Indragiri Hilir, penurunan terjadi juga dari pungutan retribusi daerah di kabupaten Siak dan Indragiri Hilir, juga penurunan dari hasil perusahaan

milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis dan kota Dumai, serta penurunan di lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai. Pada tahun 2013 hingga 2015 nilai indeks menurun menjadi 0,38 untuk tahun 2013, 0,25 untuk tahun 2014, 0,27 untuk tahun 2015. Menurunnya nilai indeks pada tahun 2013 hingga 2015 di Riau Pesisir berarti daerah dapat lebih baik dalam memungut hasil penerimaan PAD yaitu meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah meski ada beberapa daerah yang penerimaannya menurun.

Ketimpangan wilayah lebih tinggi di Riau Pesisir dibandingkan Riau Daratan berdasarkan PAD terlihat dari lebih banyak penurunan PAD yang terjadi di Riau Pesisir dari pada Riau Daratan dan lebih timpangnya hasil penerimaan PAD kabupaten/kota di Riau Pesisir selama jurun waktu 2010-2015. PAD yang semakin besar dan merata pada daerah akan mendorong terjadinya penurunan ketimpangan wilayah. Kenaikan PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan pembangunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil indeks entropi Theil dan pembahasan mengenai ketimpangan wilayah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau Daratan dengan Riau Pesisir maka dapat ditarik beberapa kesimpulan :

1. Dari hasil analisis yang menggunakan indeks entropi Theil selama kurun waktu 6 tahun 2010-2015 menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah berdasarkan PDRB di Riau Daratan lebih tinggi terjadi dari Riau Pesisir.
2. Dari hasil analisis yang menggunakan indeks entropi Theil selama kurun waktu 6 tahun 2010-2015 bahwa ketimpangan wilayah berdasarkan PAD di Riau Pesisir lebih tinggi terjadi dari Riau Daratan.

Saran

Dengan melihat hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya perhatian pemerintah secara serius untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi terutama untuk pemeratakan PDRB per kapita penduduk. Salah satunya mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang ada pada daerah secara merata, menekan laju pertumbuhan penduduk.
2. Pemerintah harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan yang potensial dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah melalui pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia secara optimal, serta kemampuan mengalokasikan sumber penerimaan pada kegiatan produktif.
3. Konsolidasi antar daerah dengan pemerintah perlu dilakukan agar

pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga pemerataan wilayah dapat tercapai dan ketimpangan terhadap ekonomi serta keuangan daerah dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Barika, 2012. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009*. Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan (JEPP), Vol 04, No. 03, ISSN : 1979-7338.
- Harun, Lukman, Ghozali Maski, 2013. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas, Vol 1, No. 2.
- Kuncoro, 2004. *Otonomi dan pembangunan daerah*. Jakarta. Erlangga.
- Nurhuda, Rama, 2013. *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur 2005-2011)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No. 2, ISSN : 2503-3867.
- Rahayu, Hesty dkk, 2014. *Analisis Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 14, No. 1, ISSN : 0853-6708

- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Baduose Media. Padang Sumatra Barat.
- Sjafrizal, 2012. *Ekonomi wilayah dan perkotaan*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Sjafrizal, 2014. *Ekonomi wilayah dan perkotaan*. Ed.1-2. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- Swandewi, Agung. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesenjangan Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 3 [7], ISSN : 2337-3067.
- Umiyati, Etik, 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatra*. Jurnal Paradigma Ekonomika Vol 1 No. 7, April 2013.

